



Munich Personal RePEc Archive

**Alternative Strategy to reduce poverty in
Papua through Microfinance
Development**

Landiyanto, Erlangga Agustino

February 2006

Online at <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/4391/>

MPRA Paper No. 4391, posted 07. November 2007 / 03:53

Strategi Alternatif Penanggulangan Kemiskinan di Papua melalui Pengembangan Keuangan Mikro

Erlangga Agustino Landiyanto*

Abstraksi

Keuangan mikro merupakan salah satu strategi efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Terdapat berbagai pemikiran tentang strategi keuangan mikro yang berbeda dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, makalah ini mencoba mengeksplorasi beberapa strategi alternatif yang sesuai dan dapat diimplementasikan dalam mengembangkan keuangan mikro di Papua. Dua koridor utama dari strategi itu berupa penguatan lembaga keuangan mikro dan pengembangan keuangan mikro berbasis komunitas.

Kata Kunci: Keuangan Mikro, UMKM, KSM, Kemiskinan

* Alumni Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Saat ini bekerja dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. email: erlanggaagustino@yahoo.com

1. Pendahuluan

Sejak menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, gerak pembangunan di Papua telah melewati berbagai tahap dan proses yang dirumuskan dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, yang seharusnya telah menempatkan provinsi ini sejajar dengan provinsi lain di Indonesia. Dalam kenyataannya, realitas pembangunan Provinsi Papua, yang dilakukan selama ini, masih menempatkan Papua sebagai wilayah dengan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

Terdapat berbagai alternatif strategi untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Papua. Salah hal yang dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Menurut Marguirite Robinson (2002), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi

pengembangan UMKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UMKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

Penciptaan lapangan pekerjaan, yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil maupun menengah, sangat tergantung dari iklim usaha dan kemampuan pembiayaan. Oleh karena itu, sekali lagi, keuangan mikro baik yang berbasis komunitas maupun yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dan juga oleh bank besar, sangat penting bagi pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, studi dalam makalah ini ini memfokuskan pada identifikasi peluang dan perumusan strategi bagi pengembangan keuangan mikro untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Papua. Makalah ini dibagi menjadi beberapa bagian, pertama: pendahuluan dan latar belakang; kedua: pengertian keuangan mikro, mekanisme keuangan mikro dan bagaimana keuangan mikro dapat membantu penanggulangan kemiskinan; bagian ketiga, keuangan mikro di Papua dan tantangan yang dihadapi; bagian keempat: peluang dan strategi alternatif dalam pengembangan keuangan mikro di Papua, bagian kelima adalah kesimpulan dan rekomendasi.

2. Tinjauan Literatur

Sampai saat ini, pelayanan keuangan mikro dianggap sebagai salah satu strategi kunci dalam penanggulangan kemiskinan, dan manfaat pelayanan keuangan mikro dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin telah banyak diungkapkan oleh studi di berbagai negara. Namun masyarakat miskin bukanlah komunitas yang homogen, dan strategi serta bentuk pelayanan keuangan mikro terus menerus berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai masyarakat miskin.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa

(payment services) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and low-income households and their microenterprises). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal.

LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), baitul mal wattanwil (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan Grameen, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan credit union. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya (Wiloejo 2005).

2.1. Keuangan Mikro: dari Masa ke Masa

Pada masa pemberian kredit pertanian bersubsidi (1950-an – 1970-an), masyarakat miskin dipandang sebagai petani kecil yang tersisihkan dengan fokus perhatian pada laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Oleh karenanya, dianggap perlu untuk meningkatkan produktivitas mereka melalui pemberian kredit. Pada era 1980-an masyarakat miskin lebih banyak dipandang sebagai pengusaha mikro, umumnya perempuan, yang tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan walaupun usahanya mempunyai prospek untuk berkembang. Berdasarkan pemahaman ini dikembangkan upaya-upaya lembaga non-pemerintah untuk menyediakan kredit mikro, khususnya bagi perempuan. Peralihan dari kredit bersubsidi ke kredit tanpa subsidi ini juga dilatarbelakangi oleh argumen bahwa masyarakat miskin sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga pinjaman, tetapi mereka lebih membutuhkan akses terhadap kredit. Kredit mikro makin berkembang pada tahun 1990-an dengan adanya

inovasi cara penyaluran kredit kepada kelompok dengan pola Grameen Bank, dengan kelompok perempuan miskin sebagai target utama. Pola ini telah menarik perhatian dunia sehingga diadopsi oleh banyak negara dan memperoleh dukungan dari banyak lembaga pendanaan. Perkembangan memunculkan industri keuangan mikro yang menerapkan konsep “*financial viability and sustainability*” lembaga penyedia layanan keuangan mikro. Perkembangan ini diiringi dengan upaya besar-besaran untuk menambah jumlah nasabah atau meningkatkan jumlah kredit per nasabah.

Pada akhir 1990-an, beberapa studi secara kritis menyoroti gejala makin tersingkirnya golongan paling miskin dari pelayanan keuangan mikro, sebagai akibat sampingan dari penekanan yang berlebihan pada kelancaran pembayaran dan ‘*institutional viability*’ lembaga pemberi layanan keuangan mikro. Secara umum, Matin, Hulme dan Rutherford juga menyatakan bahwa ketersingkiran golongan paling miskin tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian antara rancangan layanan keuangan mikro yang tersedia dengan pola kehidupan golongan masyarakat termiskin yang kegiatan ekonominya (produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, pinjaman dan kegiatan mencarinafkah) dilakukan dalam skala kecil, dan mempunyai tingkat kerentanan yang sangat tinggi terhadap gejolak ekonomi.

Perdebatan mengenai ketersingkiran golongan paling miskin dari layanan keuangan mikro tersebut mengarah pada dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama pada dasarnya beranggapan bahwa golongan paling miskin tidak memerlukan pelayanan keuangan mikro, tetapi lebih memerlukan bantuan yang bersifat langsung. Pandangan ini didasarkan pada kondisi golongan termiskin, yang umumnya tinggal di tempat terpencil dengan akses transportasi dan akses pasar yang sangat terbatas, sehingga mereka tidak akan mampu mengembalikan kredit. Oleh karenanya, penanggulangan kemiskinan bagi golongan ini harus dilakukan melalui bantuan sarana kesehatan, pangan, pendidikan, dan bukan kredit mikro (Robinson, 2002). Selain itu, muncul alasan lain mengenai mahalnya biaya untuk menjangkau golongan termiskin, yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah kredit dan

tabungan mereka, sehingga tidak akan mampu menjamin keberlanjutan dan perkembangan lembaga penyedia jasa keuangan mikro (the Microfinance Gateway).

Pandangan kedua mengajukan argumen bahwa golongan miskin pun layak mendapatkan layanan keuangan mikro, sehingga rancangan bentuk layanannya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Alasan ketidaklayakan pelayanan keuangan mikro bagi golongan termiskin yang dikemukakan oleh pandangan pertama dibantah oleh pandangan ini. Pandangan kedua ini memberikan penekanan pada perlunya perubahan paradigma keuangan mikro dari fokus pada aspek promosi atau dukungan terhadap usaha ekonomi ke arah layanan keuangan mikro yang bersifat perlindungan melalui program tabungan, pinjaman darurat, atau asuransi mikro. Menurut pandangan ini, tidak adanya permintaan terhadap pelayanan keuangan mikro lebih disebabkan oleh ketidaksesuaian antara bentuk layanan yang tersedia dengan kebutuhan mereka. Karena itu, perubahan bentuk layanan ke arah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat paling miskin menjadi prioritas yang mendesak. Berkaitan dengan isu mahalnyanya layanan dan keberlanjutan lembaga (Saikhu Usman, 2004)

2.2. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Lokal

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa

transfer payment dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro. Selain itu, kumpulan pengusaha mikro yang membentuk *cluster* pada suatu wilayah akan dapat memberikan *spread effect* positif bagi perekonomian pada wilayah tersebut.

3. Papua di Era Otonomi

Provinsi Papua (dulu Propinsi Irian Jaya) merupakan salah satu propinsi terluas di Indonesia, dengan luas daratan sebesar 42,2 juta hektar, yang merupakan 22% dari total luas Indonesia. Dalam sensus tahun 2000 yang dilakukan oleh BPS, penduduk Papua berjumlah 2,23 juta, dengan 580 ribu (26%) bermukim di daerah perkotaan, dan 1,65 juta (74%) tinggal di pedesaan. Menurut data BPS tahun 2003, jumlah penduduk meningkat menjadi 2,35 juta, dengan 646 ribu (27,5%) tinggal di daerah perkotaan and 1,7 juta (72,5%) di daerah pedesaan. Menurut sumber yang sama, hanya sepertiga penduduk perkotaan adalah asli Papua, sementara di daerah pedesaan penduduk asli merupakan tiga perempat dari total penduduk (UNDP, 2005a).

Papua dianugerahi dengan sumber daya hutan, air dan mineral yang melimpah, yang bersama dengan berbagai budayanya yang dinamis, memberi identitas tersendiri pada Papua. Meskipun Papua menikmati tingkat PDRB per kapita keempat tertinggi di Indonesia yakni Rp.11 juta, terutama dari industri yang terkait dengan sumber daya alam, namun keberhasilan ekonomi tersebut tidak dinikmati oleh kebanyakan orang Papua dan belum dikonversikan menjadi tingkat pembangunan manusia yang sesuai. Papua adalah provinsi dengan insiden kemiskinan yang

tertinggi di Indonesia dimana 41,8% penduduk Papua berpenghasilan kurang dari US\$1 per hari, atau lebih dari dua kali rata-rata nasional yang mencapai 18,2% (UNDP, 2004).

Sebelum pemekaran, jumlah kabupaten/kota dan Kota di Papua sangat terbatas. Masing-masing Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Fakfak, Yapen-Waropen, Biak Numfor, Paniai, Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kota Madya Jayapura. Terbatasnya jumlah kabupaten/kota telah merupakan salah satu faktor penentu rendahnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (UNDP, 2005).



Gambar 1: Peta Irian jawa/ Papua

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di Papua telah dibentuk 3 kabupaten baru. Masing-masing: (1) Kabupaten Mimika hasil pemekaran Kabupaten Fakfak, (2) Kabupaten Nabire, dan (3) Kabupaten Puncak Jaya hasil pemekaran Kabupaten Paniai. Ketiga kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 45/1999. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor

5/2000, pemerintah mengukuhkan Kotamadya Administratif Sorong menjadi Kotamadya Sorong. Dengan demikian Provinsi Papua telah terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kotamadya.

Berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang sangat dinamis, pemerintah kembali membentuk 14 kabupaten baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 26/2002. Ke 14 kabupaten baru ini adalah (1) Kabupaten Sorong Selatan dan (2) Kabupaten Raja Ampat hasil pemekaran Kabupaten Sorong, (3) Kabupaten Pegunungan Bintang, (4) Kabupaten Yahukimo, (5) Kabupaten Tolikara hasil pemekaran Kabupaten Jayawijaya, (6) Kabupaten Waropen hasil pemekaran Kabupaten Yapen-Waropen, (7) Kabupaten Kaimana hasil pemekaran Kabupaten Fakfak, (8) Kabupaten Bovendigoel, (9) Kabupaten Asmat, (10) Kabupaten Mappi hasil pemekaran Kabupaten Merauke, (11) Kabupaten Teluk Bintuni, (12) Kabupaten Teluk Wondama hasil pemekaran Kabupaten Manokwari, (13) Kabupaten Sarmi dan (14) Kabupaten Keerom hasil pemekaran Kabupaten Jayapura.

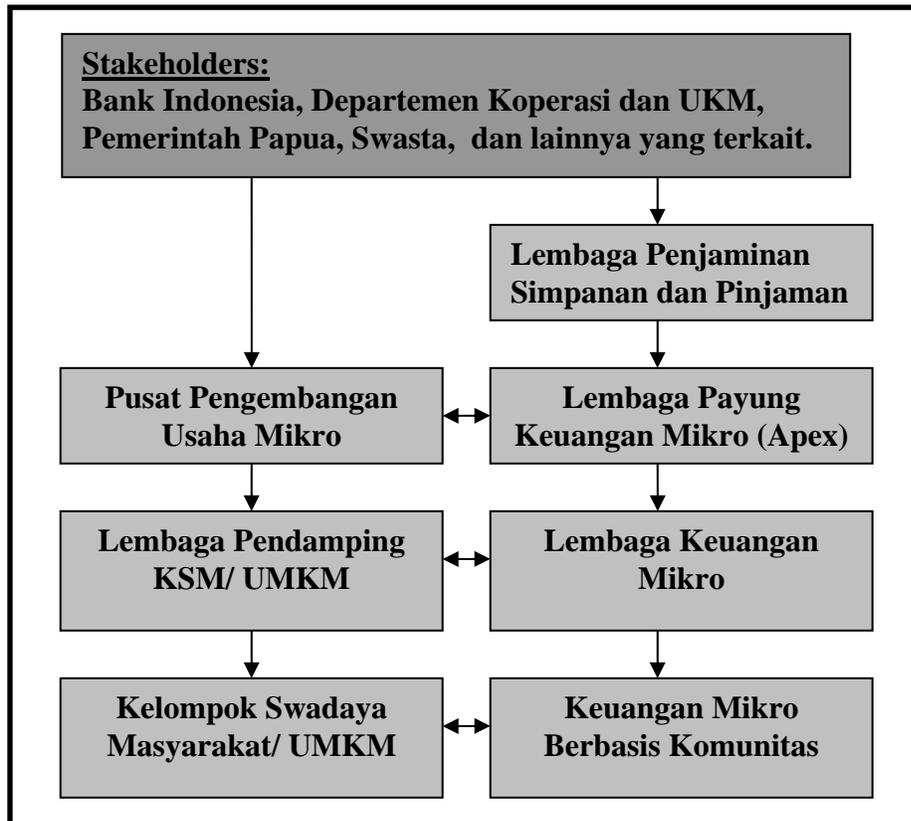
4. Strategy Pengembangan Keuangan Mikro di Papua

Dengan wilayah yang luas, hanya sedikit bank umum yang memiliki cabang di Papua, antara lain bank BRI, Bank Mandiri, Bank Papua dan beberapa bank besar lainnya. Bank umum yang paling ekspansif dalam memberikan kredit bagi UKM adalah Bank Papua, dimana dalam hal pendanaan, Bank Papua mendapat dukungan dari perusahaan dan industri besar yang ada di Papua. Pada sisi keuangan mikro, propinsi Papua hanya memiliki sedikit lembaga keuangan mikro, antara lain 6 BPR, 5 Baitul Maal Wan Tanwil (BMT) Yinbuk, 30 BRI UNIT, 501 Koperasi, 13 Credit Union, 5 Perum Pegadaian dan 24 TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam) yang tersebar pada kabupaten utama di Papua yang merupakan kutub pertumbuhan (Profi, berbagai edisi).



Gambar 2: Kendala Pengembangan Keuangan Mikro di Papua

Dengan sedikitnya Lembaga keuangan di papua, sangat sulit untuk melakukan penetrasi dan perluasan pasar terutama pada wilayah terpencil. Membutuhkan biaya mahal untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah pedalaman di papua, padahal untuk beroperasi di papua sendiri sudah sangat mahal bagi perbankan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya wewenang bank umum yang beroperasi di Papua untuk menyalurkan kredit. Selain itu, mahalny biaya operasional akan berdampak dengan tingginya bunga kredit, sehingga semakin akan semakin menyulitkan UKM. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya jumlah kabupaten dan kota di papua, dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki wilayah yang sangat luas.



Gambar: 3 Skema Pengembangan Keuangan Mikro di Papua

Untuk pengembangan usaha-usaha mikro, di wilayah pusat ekonomi, baik di perkotaan maupun pedesaan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat diandalkan sebagai lembaga yang mampu memberikan jasa pelayanan keuangan dan pengembangan usaha-usaha mikro secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan BPR mampu menawarkan pelayanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan keuangan usaha mikro. Pasar keuangan mikro yang mencakup ribuan usaha mikro termasuk disektor informal tidak dapat dilayani oleh bank umum oleh karena skala ekonominya kecil. Prinsip kerja BPR ialah melayani jasa keuangan ditempat kerja nasabahnya. Pengembangan usaha mikro tidak dapat dilakukan oleh bank-bank besar termasuk modal ventura yang umumnya melayani nasabah berskala besar. BPR diandalkan oleh karena lembaga ini diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia.

Community development dapat menjadi salah satu strategy utama dalam mendukung penanggulangann kemiskinan di papua, terutama bagi masyarakat pedalaman Untuk itu, pendekatan partisipatif dalam pembangunan masyarakat, baik dalam bidang pertanian, perikanan maupun usaha kecil dan rumah tangga yang merupakan bagian *local economic development (LED)* dapat berjalan secara komplement Memfasilitasi terbentuknya kluster industri bagi tiap sektor usaha yang potensial serta memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan infratraktur pendukung kluster, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sektor tersebut dan memudahkan lembaga pendamping dalam melakukan *assistance*.

Untuk mendukung *community development*, diperlukan pendekatan lain untuk menjangkau masyarakat pedalaman maupun usaha mikro dan rumah tangga di wilayah tersebut, karena sangat sulit untuk mengharapkan dukungan formal Lembaga Keuangan Mikro agar dapat menjangkau segmen tersebut, karena mahalnya biaya di pedalaman. oleh karena itu, salah satu pilihan terbaik untuk mendukung tumbuhnya industri kecil dan rumah tangga di pedalaman papua adalah dengan menggunakan dengan keuangan mikro berbasis komunitas (*commnunity based microfinance*) yang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Strategi utama dalam pengembangan keuangan mikro berbasis komunitas adalah memfasilitasi pembentukan maupun pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap desa maupun memberdayakan kelompok yang telah ada sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat dan yang juga dapat berperan sebagai kelompok simpan pinjam maupun KSM usaha kecil , Perikanan, maupun Pertanian . Kelompok swadaya masyarakat tersebut dapat difasilitasi agar dapat menjadi *group lending* yang menjadi pintu dalam aktifitas simpan pinjam antara kelompok dengan lembaga keuangan mikro formal yang ada sehingga memudahkan dan mengurangi biaya bank maupun lembaga keuangan mikro dalam pengelolaan kredit terhadap. Selain itu, *group lending* yang ada perlu didampingi dan diperkuat kapasitasnya agar *bankable*.

Dalam mendukung strategi tersebut, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun lembaga pendampingan KSM di Papua seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Business Development Services (BDS)* maupun KKMB dalam menghubungkan UMKM atau KSM maupun *group lending* dengan bank. yang dimaksud dengan “menghubungkan UMKM dan KSM dengan bank” tidak hanya memberikan informasi tentang bank maupun cara memperoleh kredit, akan tetapi mempersiapkan agar UMKM tersebut *bankable*. Kapasitas lembaga pendamping dapat ditingkatkan dengan pemberian pelatihan maupun informasi oleh Pemerintah, donor dan stakeholder lainnya.

Untuk menjaga *sustainability* peningkatan kapasitas lembaga pendampingan UMKM maupun KSM, seperti telah disebutkan sebelumnya, perlu didirikan lembaga payung yang dapat memfasilitasi penguatan kapasitas lembaga pendamping UMKM secara kontinyu. Dalam hal ini, lembaga ini dapat didirikan sebagai bagian dari kerjasama antara lembaga donor, LSM maupun perusahaan multinasional di Papua.

Lembaga payung ini bisa berupa suatu pusat pengembangan usaha kecil dan mikro yang dikelola secara profesional. Tugas dari pusat pengembangan ini adalah untuk mengkoordinasi, memfasilitasi, memantau dan melakukan promosi usaha kecil dan melakukan *fund-raising* untuk usaha mikro dan kecil. Lembaga ini diharapkan juga menyelenggarakan latihan-latihan, konsultasi dan riset pengembangan usaha mikro dan kecil, serta mempersiapkan lembaga-lembaga pendamping UKM agar mampu untuk mendampingi UMKM maupun KSM agar dapat mengakses layanan perbankan. Pemerintah daerah maupun stakeholder lain perlu melakukan investasi dalam lembaga ini untuk memungkinkan lembaga ini tumbuh secara profesional. Untuk dapat berfungsi dengan baik lembaga ini harus melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan para ahli yang mempunyai pengetahuan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga ini berfungsi sebagai suatu service center pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Agar lembaga keuangan mikro seperti BPR, mampu menjangkau kebutuhan semua sektor dan juga mendukung berjalannya *community based microfinance*, *need assesment* dan *sectoral mapping* terhadap UMKM, petani, dan nelayan dalam konteks *Access to Finance* yang dapat menjadi acuan perbankan dalam memberikan kredit terhadap UMKM dan juga dapat menjadi acuan bagi lembaga pendampingan dalam memberikan *assistance* terhadap UMKM, assesment ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh BPR-BPR anggota perbarindo, dinas koperasi maupun bank indonesia.

Selain mengenali UMKM, perlu adanya penguatan lembaga keuangan mikro maupun pengembangan lembaga pendukung baik dalam kapasitas kelembagaan maupun kemampuan memberikan kredit agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikaan pelayanan. Dalam konteks pengembangan UMKM, Pertanian dan perikanan, pengembangan kapasitas Lembaga keuangan Mikro Papua dapat dilakukan dengan beberapa strategi.

Salah satu strategi efektif adalah memfasilitasi terbentuk atau mendukung berkembangnya lembaga penjaminan kredit untuk kredit bagi UMKM maupun kredit produktif lainnya (Kredit bagi Pertanian dan Perikanan). Lembaga Penjaminan ini dapat dibentuk atau dikelola langsung oleh Perusahaan Multinational maupun dikelola oleh *Stakeholders* (Pemerintah daerah Papua, Bank Indonesia, PNM, Departemen UKM dan Koperasi, etc), atau dikelola oleh pihak ketiga seperti perusahaan multinasional di papua.

Perlu adanya dukungan dari perusahaan multinasional yang ada di papua maupun sektor swasta lain untuk menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan tersebut (sebagai bentuk dari *corporate social responsibility*) untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada UKM, maupun petani di wilayah kepala burung. Kredit tersebut bisa disalurkan secara langsung maupun dengan sistem *chanelling* melalui Lembaga keuangan Mikro atau pertbankan yang ada di papua.

Memberikan subsidi bagi kredit untuk UMKM, pertanian, dan perikanan terutama kredit yang berbiaya mahal (kredit untuk masyarakat pedalaman) juga

merupakan salah satu strategi yang efektif. Akan tetapi perlu ada kehati-hatian dalam pemberian subsidi kredit. Bentuk subsidi dalam bentuk subsidi terhadap bunga kredit akan merusak pasar lembaga keuangan yang lain, bentuk subsidi yang lebih baik adalah dengan menyimpan dana abadi berbunga rendah di perbankan untuk disalurkan kepada UMKM di wilayah kepala burung untuk meningkatkan kemampuan bank dalam memberi kredit.

Untuk mendukung hal-hal tersebut, perlu difasilitasi terbentuknya atau mendukung berkembangnya organisasi yang dapat memayungi dan meningkatkan kapasitas lembaga keuangan mikro (APEX) di wilayah kepala burung. Lembaga Apex ini dapat dibentuk atau dikelola langsung oleh perusahaan multinasional di Papua, dikelola oleh *Stakeholders* (Pemerintah daerah Papua, Bank Indonesia, PNM, Departemen UKM dan Koperasi, etc), atau dikelola oleh pihak ketiga dibawah pengawasan seluruh *Stakeholders*.

5. Kesimpulan

Berbagai studi menunjukkan bahwa, keuangan mikro merupakan salah satu strategi efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Oleh karena strategi pengembangan keuangan mikro yang efektif dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan di Papua baik diperkotaan maupun dipedalaman.

Hanya ada sedikit bank umum yang ada di Papua yang dapat melayani UMKM, oleh karena itu perlu strategi khusus dalam membangun keuangan mikro Papua. Penguatan keuangan mikro di Papua dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain adalah dengan penguatan kapasitas lembaga keuangan mikro (LKM), pendirian lembaga Apex bagi LKM, pemberian kredit bersubsidi, chaneling maupun adanya lembaga penjaminan kredit.

Selain itu perlu dibangun keuangan mikro berbasis komunitas (*community based microfinance*) baik dengan pembentukan dan penguatan kelompok swadaya masyarakat (*KSM*), *group lending* yang didukung dengan penguatan lembaga pendamping UKM melalui pelatihan maupun lembaga payung,

6. Daftar Pustaka

- BP Tangguh (2005a) *“Tangguh LNG Project in Indonesia: Survey Environmental Impact Assessment”* June 2005.
- BP Tangguh (2005b) *“Resettlement Planning Document”* prepared by BP Tangguh for ADB
- BP Tangguh (2005c) *“Indigeneous Peoples Development Planning Project”* prepared by BP Tangguh for ADB
- Marqueritte S Robinson (2002) *“Microfinance Revolution: Lessons from Indonesia”* International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
- Profi, berbagai edisi. Hasil kerjasama antara Bank Indonesia dan GTZ
- The Asia Foundation (2003) *“Microfinance Services in Indonesia: A survey of Institutions in 6 Provinces”* Collaboration beetwen The Asia Foundation and CBG Harvard for Bank Rakyat Indonesia.
- Thomas Tilberg (2001) *“Institutional Credit in Iran Jaya/West Papua and its Prospect”* The Partnership for Economic Growth (PEG), USAID
- UNDP (2004) *“Indonesian Human development report: Economic of Democracy”* Hasil kerjasama UNDP, Bappenas dan BPS.
- UNDP (2005a) *“Kajian Kebutuhan Papua: Ringkasan Temuan dan Pengaruh terhadap Temuan Bantuan Program Pembangunan”* ” Hasil Kerjasama UNDP-Papua Capacity Needs Assessment dengan Universitas Negeri Papua
- UNDP (2005b) *“Laporan Akhir: Kajian Kapasitas Pemerintah Daerah Delapan Kabupaten Tepilih di Papua”* Hasil Kerjasama UNDP-Papua Capacity Needs Assessment dengan Universitas Negeri Papua
- Saikhu Usman, Widjayanti S, Bambang S, Nina T, M. Sulton & Akhmadi (2004) *“Lesson Learned from Microfinance Services in East Nusa Tenggara”* SMERU Field Report: December 2004.
- Wiloejo Wiryo Widjono (2005) *“Pemberdayaan lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Ekonomi Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”* Kajian Ekonomi dan Keuangan, November 2005